

Judul : Cegah Karhutla meluas, legislator sarankan tindakan luar biasa
Tanggal : Sabtu, 22 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Karhutla Meluas

Legislator Sarankan Tindakan Luar Biasa

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kian mengkhawatirkan. Kabut asap mulai mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini membuat Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah *extraordinary* alias Langkah luar biasa.

Alex menilai, penanganan karhutla tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Apalagi, kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026.

"Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini," tegas Alex dalam keterangannya tertulis, Jumat (21/8/2026).

Desakan tersebut disampaikan setelah dampak karhutla mulai dirasakan langsung masyarakat. Indeks kualitas udara atau Air

Quality Index (AQI) di Palangka Raya bahkan mencapai 487 pada 19 Agustus 2026. Angka tersebut masuk kategori berbahaya.

Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan menunda jam masuk siswa SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB. Sementara anak-anak PAUD dialihkan mengikuti pembelajaran jarak jauh.

Tak hanya itu, jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga sekitar 1,4 kilometer. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas transportasi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan. Rinciannya, 767 titik berada di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Tengah, 34 titik di Kalimantan Selatan dan 17 titik di Kalimantan Utara.

Alex menilai, sebaran titik panas yang hampir terjadi di seluruh provinsi menunjukkan karhutla Kalimantan sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas wilayah.



Alex Indra Lukman

"Penyebaran titik karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," ujarnya.

Menurut Alex, kondisi tersebut terlihat dari sejumlah daerah yang harus memperpanjang status tanggap darurat. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 4 September 2026.

Di Kobar, karhutla telah menghancurkan 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian. Sebanyak

461 titik panas juga terdeteksi di wilayah tersebut. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi dua wilayah yang terdampak paling parah. Di Arut Selatan, tercatat 98 kejadian karhutla yang membakar sekitar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai, sebanyak 63 kejadian karhutla telah membakar 584,41 hektare lahan.

Alex mengingatkan, kondisi saat ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi total pola penanganan karhutla. Pasalnya, kebakaran besar bukan fenomena baru dan memiliki pola berulang.

"Data MapBiomass Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," tegasnya.

Alex mengatakan, evaluasi kebijakan penanganan karhutla harus dimulai dari penguatan deteksi dini dan patroli di wilayah

rawan kebakaran. Sistem peringatan dini berbasis satelit juga perlu terus ditingkatkan agar lebih akurat dan mampu memberikan informasi lebih cepat.

Namun, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan. "Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas," terangnya.

Menurut Alex, penanganan karhutla harus diarahkan pada strategi jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api ketika kebakaran terjadi, tetapi harus memperkuat pencegahan, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat serta membenahi tata kelola lahan.

Dengan begitu, penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh akar persoalan. Langkah tersebut dinilai penting agar bencana asap yang mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi dan perekonomian tidak kembali menjadi siklus tahunan di Kalimantan. ■ BYU